

Potret Ketegangan Internal Sinode Non Mainstream Studi Kasus Gereja Am GPR Manado Ditinjau dari Sosiologi Organisasi

Zaenal Abidin Eko Putro

Prodi Jurnalistik, Politeknik Negeri Jakarta, Kampus UI

Email : zaenalaep@yahoo.com

Diterima redaksi tanggal 4 Februari 2016, diseleksi tanggal 27 Mei 2016 dan direvisi 5 Juni 2016

Abstract

The Ministry of Religious Affairs through its Directorate General for Christianity Affairs has facilitated the establishment of new union's synod. It is the response of the proposal of legalization that has been proposed for establishing new synod by a number of small group of churches. Some new synods are able to accept the policy and collaborate with other new synods to establish a union of synod. One of the examples is Synode Am GPR located in Manado city and the surrounding area. However, after being legalized by the government, the synod is overwhelmed by internal conflict. As a result, the management of the synod did not work well.

To look at internal structure of this synod, this study adopts organizational sociology theory form Max Weber. It is to see to what extent organizational culture as well as organizational structure works in the synod. This study aims at describing how the government has facilitated the establishment of new synod, board of new synod. But it did not show good performance. Besides, internal conflict occurred among the boards. This paper is based on the qualitative research through in-depth interview, literature study and observation.

Keywords: *new synod, oikumenikal, evangelical, organizational sociology, internal structure, and priest role.*

Abstrak

Kementerian Agama RI melalui Ditjen Bimas Kristen telah memfasilitasi pembentukan sinode gabungan, untuk menghimpun sinode-sinode baru yang ingin mendapatkan legalitas dari pemerintah. Hal ini terkait dengan wacana moratorium pendirian sinode baru. Beberapa sinode bersedia menerima intervensi pemerintah dan terbentuklah sinode gabungan. Salah satunya adalah Sinode Am GPR yang terkonsentrasi di wilayah Manado dan sekitarnya. Akan tetapi dalam perjalanannya, sinode ini diguncang persengketaan dan perselisihan internal yang berbuah tidak berjalannya roda organisasi sinode.

Untuk melihat struktur dan kultur internal sinode ini, dalam paper ini digunakan teori sosiologi organisasi model Weber untuk melihat sejauh mana sebenarnya kultur dan struktur yang berkembang dalam sinode ini. Paper ini bertujuan untuk memberikan gambaran betapa sinode baru yang diusulkan dan difasilitasi pemerintah pun tidak mulus penataannya, hingga malah tersandera konflik internal. Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam, studi pustaka dan diperkuat observasi lapangan.

Kata kunci: Sinode baru, oikumenikal, evangelical, sosiologi organisasi, struktur internal, dan peran pendeta.

Pendahuluan

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen (Ditjen Bimas Kristen) Kementerian Agama RI dalam satu dekade terakhir disibukkan pengusulan pendirian denominasi atau sinode baru. Lembaga gereja (denominasi) terus bermunculan, yang hingga saat ini menurut data lembaga tersebut mencapai 330 sinode, berkembang dari yang sebelumnya berjumlah 323 sinode. Akan tetapi, selain menampung berbagai usulan, terungkap juga persengketaan internal di tubuh sinode-sinode tersebut. Salah satu denominasi yang permasalahannya sejak dalam beberapa tahun terakhir mencuat adalah Sinode Gereja Am GPR (Gereja Pimpinan Roh Kudus), salah satu sinode baru yang berbasis di Manado dan sekitarnya.

Permasalahan menyangkut solid tidaknya organisasi sinode tersebut, sangatlah layak untuk dilihat lebih dalam. Melihat kondisi perselisihan di dalam tubuh sinode tersebut, sebagai salah satu contoh institusi keagamaan dengan karakter kuatnya keanggotaan, patut dipertanyakan seperti apa struktur sosial yang terbangun dalam organisasi tersebut. Begitu pula tentang tanggung jawab serta hierarki kewenangan dalam kepengurusan. Dalam disiplin ilmu Sosiologi, dinamika organisasi juga menjadi bagian dari kelompok sosial yang adekuat sifatnya untuk diteliti dan digali lika-liku di dalamnya (Sunarto, 2004: 134-135).

Paper ini berusaha untuk menggali permasalahan yang mendera di internal sinode ini ditinjau dari sudut pandang sosiologi organisasi. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam, observasi serta studi terhadap bahan pustaka. Informan yang diwawancarai di antaranya tokoh-tokoh yang terlibat dalam permasalahan di tubuh sinode Gereja Am GPR, serta informan dari sinode lain yang relatif tidak terjadi gejala di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kekuatan paling nyata penelitian kualitatif terletak pada posisinya yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Cresswell (1994) mencatat, penelitian kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Metode kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif Weberian, perspektif post-positivistik kelompok teori kritis serta post-modernisme seperti dikembangkan oleh Baudrillard, Lyotard, dan Derrida (Somantri, 2005: 58).

Dilihat sebagai proses, rintisan gagasan penelitian ini diawali setelah beberapa lama mengikuti diskusi tentang pengaturan rumah ibadah bersama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI yang bekerja sama dengan Ditjen Bimas Kristen (2014-2015) dan juga sesaat dengan kalangan perwakilan sinode di bawah PGI. Penulis mulai menangkap denyut dinamika di dalam tubuh sinode baru yang lebih bercorak kharismatik. Penelitian terhadap Sinode Aam GPR di Manado dan sekitarnya ini berdasarkan penelusuran sample yang sudah ditentukan. Informasi yang paling akurat diperoleh dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag yang mengurus legalias sinode-sinode di Indonesia.

Untuk menggali data, peneliti wawancarai tokoh-tokoh yang terlibat dalam pendirian Sinode Aam GPR dan juga sekaligus yang terlibat pengorganisasian sinode baru ini. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa. Ditemukan pula kendala-kendala menjalankan roda organisasi dipandang dari sisi para informan yang terlibat di dalamnya.

Gereja dan Denominasi Baru Di Minahasa

Sebagai sinode dominan di Minahasa, peran sinode Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) yang berdiri sejak tahun 1934 (<http://www.gmim.or.id/sejarah-singkat-gmim/>, diakses 1 Juni 2016) tidaklah terbantahkan. Perannya sangat dirasakan di masyarakat, sebagai faktor penengah jika terjadi kekalutan dalam masyarakat terkait aspek sosial, ekonomi maupun politik. Peran GMIM begitu dirasakan dalam turut mempopulerkan dan menyetabilkan harga cengkeh di Minahasa misalnya, terutama di tahun 1980an hingga 1990an yang waktu itu dibumbui dengan istilah pembangunan. Banyak pengurus GMIM yang juga pegawai pemerintah berperan dalam hal ini (Borkenhagen, 2004: 15).

Peran GMIM di ranah yang lain juga telah teruji. Telah banyak diakui, Manado dan sekitarnya dikenal sebagai kota yang paling aman dari sisi kerusakan yang membawa serta unsur agama maupun etnis. Sebagai gereja dominan, GMIM juga diakui di sini turut mengambil peran sangat penting dalam menjaga keharmonisan, walaupun wilayah ini contohnya pernah dibanjiri pengungsi akibat kerusakan berbau agama di Ambon dan Maluku di awal tahun 2000-an. Pada saat itu, pimpinan sinode ini aktif menggalang kerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang agama dan etnis yang sama-sama berusaha mewujudkan Kota Manado dan Minahasa tetap kondusif dan tidak terpengaruh konflik yang sangat mungkin terbawa pengungsi (Thufail, 2011: 152-158).

Dengan demikian, posisi sentral GMIM tidak terbantahkan. Akan tetapi, di balik kekuatan GMIM yang demikian menyebar di Minahasa, ternyata muncul pula berbagai sinode lain yang lahir lebih belakangan. Jumlah gereja di luar GMIM juga layak diperhitungkan. Data tahun

2000 menyebutkan, terdapat 830 desa di Minahasa yang mendirikan 780 gereja GMIM yang artinya memperkuat data 90 persen penduduk Minahasa beragama Kristen. Di sini pula artinya sekitar 60 persen penduduk Kristen Minahasa bernaung dalam GMIM, sedangkan sisanya bergabung dengan Gereja Advent Hari Ketujuh, Gereja Pantekosta, Gereja Katholik dan gereja-gereja lainnya yang mencapai sekitar 30 persen. Hanya saja, GMIM-lah yang meneruskan peninggalan gereja kolonial yang tergabung dalam *Dutch Missionary Society* (Borkenhagen, 2004: 75). Inilah yang membedakan GMIM dengan gereja-gereja yang bukan GMIM di wilayah Minahasa.

Tumbuhnya banyak denominasi di wilayah Minahasa tidak lepas dari faktor meningkatnya kesejahteraan masyarakat akibat tingginya harga cengkeh di awal tahun 1970-an. Banyak gereja baru didirikan di desa-desa atau direnovasi saat itu. Pada saat yang sama, muncullah pertentangan di dalam tubuh gereja-gereja GMIM, yang kadang berujung tidak terdamaikan. Perselisihan terkadang dipicu persoalan keluarga di antara jemaat dan juga persengketaan antar penduduk desa yang merembet pada perpecahan di dalam tubuh GMIM di tingkat lokal. Oleh sebab itu, kemunculan denominasi-denominasi itu lebih disebabkan bukan karena aktivitas *missionary* gereja-gereja lain dalam tubuh jemaat GMIM, melainkan terjadi akibat konflik di dalam tubuh jemaat GMIM sendiri (Aritonang & Steenbrink, 2008: 440-441; Hakim, 2009: 183).

Karakter gereja Protestan atau sinode di luar GMIM memang cenderung berbeda dengan GMIM. Apabila GMIM dikenal memiliki kedekatan dengan adat Minahasa, maka gereja-gereja atau sinode baru ini lebih pada posisi yang berlawanan dengan adat dan sangat konservatif dalam mengimani Kekristenan. Dalam referensi disebutkan, untuk model sinode atau

gereja seperti GMIM ini dikelompokkan ke dalam gereja-gereja oikumenikal, yang berposisi berbeda dengan kelompok evangelikal. Oikumenikal cenderung lebih memusatkan pada dimensi sosial kemanusiaan atau antroposentrisme dari pekabaran Injil, bahwa keselamatan juga berdampak sosial dan kemanusiaan secara keseluruhan. Di lain pihak, gereja-gereja evangelikal cenderung lebih berfokus pada dimensi spiritual individu-individu dari Injil. Konsekuensinya, pertobatan dan kesalehan pribadi merupakan kunci keselamatan (Siwu, 1993: 203-204). Untuk konteks Minahasa, dan juga di luar Minahasa tentunya, kelompok kedua ini juga sering disebut kelompok kharismatik.

Meminjam istilah Bernice Martin, Wijaya menyebutkan kelompok gereja kharismatik ini dikenal dengan *the third force of Christianity*. Kekristenan gelombang ketiga ini tidak didasarkan pada kewibawaan tradisi, tetapi pada kemampuan untuk bertahan berkompetisi dengan gereja-gereja lain, baik gereja-gereja yang tergolong tradisional maupun yang sama-sama tergolong gereja "gelombang ketiga". Aliran ini tidak sependapat dengan aturan-aturan gereja lama dengan kredo-kredo dan birokrasinya, dan mendasarkan keanggotaan pada keputusan dan komitmen sukarela pribadi yang menjadi jamaat sinode bersangkutan (Wijaya, 2007: xii-xiii).

Untuk analisis subjek yang sama, Van Kooij & Tsalatsa (2007: 2-3) menyebut gereja mainstream (GM) untuk oikumenikal dan gereja Kalangan Kharismatik Pantekosta (KKP) untuk evangelikal, yang saling bersaing dalam menunjukkan eksistensinya. Kalangan GM menuduh orang-orang KKP sombong rohani. Demonstrasi mukjizat kesembuhan yang ditampilkan sering dinilai berlebihan dan direkayasa. KKP dinilai terjebak pada karunia-

karunia roh yang spektakuler, bahkan cenderung "gila roh". KKP juga dinilai terlalu berorientasi pada diri sendiri dan menyuburkan ciri-ciri introvert, eksklusif dan individualistis. Sebaliknya pihak KKP menolak, minimal mencela, masyarakat luas yang mereka anggap duniawi, jahat, penuh permusuhan, serta tersesat tanpa harapan. Salah satu kritik tajam KKP adalah pengaruh adat yang masih dominan di dalam gereja, sehingga mempengaruhi kehidupan orang Kristen.

Namun sejak kapan sinode baru itu, di luar sinode mainstream, menjejalkan kakinya di dataran tinggi Minahasa, adalah pertanyaan lebih lanjut yang perlu ditelusuri. Jika GMIM dianggap gereja mainstream meneruskan gereja Belanda (*Dutch Missionary Society*) dan berdiri sejak 1934, maka sebenarnya gereja non mainstream juga telah menjejalkan kaki di Minahasa pada tahun 1920an, yaitu bertepatan dengan kembalinya para tahbisan Pantekosta dari Jawa. Tercatat putra Silian (Minahasa Tenggara) yaitu Julianus Repi dan Alexius Tambuwun, dua orang Minahasa yang dibaptis di Cepu 30 Maret 1923 oleh Cornelius E. Groesbeck, missionaris Pantekosta dari Amerika dan dibantu oleh J. Thiessen, seorang missionary dari Belanda. Penerusnya adalah Markus Tumigolung termasuk salah perintis Pantekosta pertama kali di tanah Minahasa khususnya di Desa Silian, kemudian menyebar keseluruh desa yang ada di Minahasa bagian tenggara sekarang (Watania, 2015: 4 & 17).

Sebagaimana disinggung di atas, kelompok Pantekosta ini ditempatkan sebagai bagian dari sinode atau gereja evangelikal, dan bukan oikumenikal. Atau dalam istilah lain dapat dikategorikan ke dalam Kalangan Kharismatik Pantekosta, yang dilawankan dengan eksistensi gereja-gereja *mainstream* oikumenikal. Berangkat dari sini, terbuktilah bahwa Pantekosta sebagai salah satu denominasi baru yang berkembangnya belakangan di

wilayah Minahasa, ketimbang gereja lokal yang lebih dulu diterima masyarakat secara luas.

Jika terdapat 40 persen umat Kristen di Minahasa berada di luar naungan GMIM, maka perlu dicatat keberadaan sinode di luar GMIM seperti Gereja Advent Hari Ketujuh, Gereja Pantekosta, Gereja Katholik dan gereja-gereja lainnya, termasuk Sinode Am GPR. Sinode baru ini difasilitasi pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bimas Kristen. Menurut keterangan seorang pendeta GMIM dan juga pejabat struktural di Kemenag di wilayah Sulawesi Utara, pendeta dan gerejanya yang tergabung dengan Sinode Am GPR ini dahulu kebanyakan jemaat Pantekosta (wawancara tanggal 12 Agustus 2015). Karena itu wajarlah menurutnya jika pengelolaan gereja dalam sinode ini hampir sama dengan gereja Pantekosta.

Benarlah bahwa struktur dan karakter kepengurusan di dalam sinode ini mencerminkan pada tipe evangelikal ketimbang oikumenikal. Ciri yang paling terlihat adanya unsur ketokohan yang berlebihan (patrimonial) yang mengatur dan menentukan keberlangsungan organisasi sinode. Di sisi lain, ketokohan tersebut membawa serta kharisma yang melekat pada tokoh tersebut, sehingga perpaduan patrimonialisme dan kharisma ini menjadikan manajerial di tubuh sinode ini berjalan di luar harapan. Terjadilah perselisihan dan sengketa antarpengurus yang terdiri dari berbagai unsur gereja atau sinode yang tergabung dalam sinode baru tersebut.

Kultur Organisasi dan Struktur Internal Sinode Am GPR

Perselisihan dan sengketa di dalam Sinode Am GPR ini lebih banyak melibatkan antarpengurus yang berasal dari berbagai sinode yang diwadahi ke dalam suatu sinode besar yang difasilitasi pemerintah. Pertikaian terjadi dari mulai

aspek personal, teologi, serta manajerial kepengurusan sinode. Permasalahan juga muncul terkait dengan hierarkhi kepengurusan dan kewenangan serta tanggungjawab setiap level kepengurusan yang masih belum berjalan maksimal. Dalam ranah ini, teori sosiologi organisasi dipandang layak untuk dijadikan pisau analisis dalam melihat kasus ini.

Apabila sosiologi secara umum memusatkan perhatian pada pemahaman struktur sosial di masyarakat, maka sosiologi organisasi berfokus pada struktur internal dalam suatu organisasi seperti misalnya hierarkhi pengambilan keputusan (manajerial) maupun struktur eksternal yang mengaitkan organisasi dengan pihak luar. Untuk yang terakhir ini contohnya bagaimana organisasi itu membangun aliansi strategis dengan pihak atau organisasi lain. Oleh sebab itu, sosiologi organisasi juga tidak salah jika dikatakan berpusat pada kerja-kerja organisasi.

Max Weber (1864-1920) adalah ahli sosiologi yang dipandang membidani lahirnya Sosiologi Organisasi. Weber telah membedakan antara otoritas (*authority*) dan kekuasaan (*power*). Otoritas dimaknai sebagai suatu ketertundukan tanpa paksaan. Otoritas dapat berupa rational-legal yang bersumber pada aturan ataupun bersumber tradisi yang oleh pengikutnya, seorang pemimpin dipandang sebagai sosok yang memperoleh mukjizat, atau keramat. Weber juga membahas mengenai birokrasi yang menurutnya juga bersumber dari unsur rational-legal yang di dalamnya terdapat hierarkhi yang ditentukan aturan dan juga mengikuti aturan.

Weber sebenarnya mengkritik bentuk organisasi sebelumnya yang cenderung bersifat patrimonial. Melalui birokrasi, struktur organisasi lebih dominan karena keunggulannya dalam mengefisiensi pekerjaan. Organisasi yang bercirikan patrimonial sangat

lekat dengan pengaruh kharisma. Patrimonialisme dengan kharisma yang melekatinya membawa konsekuensi tidak efisiennya manajerial untuk mencapai suatu tujuan. Dalam perkembangannya, sejarah telah mencatat bahwa otoritas tradisional telah tergantikan oleh otoritas birokrasi. Jelaslah bahwa sosiologi Weber ini sangat menekankan kekuatan budaya dan nilai, yang sangat berbeda dengan kondisi material seperti yang ditekankan Karl Marx (Donaldson, www.eolss.net/sample-chapters/.../e6-99a-20.pdf, diakses tanggal 3 Februari 2016).

Tidak dipungkiri bahwa di dalam tubuh Sinode Am GPR yang berbasis di Minahasa ini juga terdapat karakter organisasi seperti yang diuraikan di atas. Terdapat pembagian kewenangan yang tercermin dari tersusunnya kepengurusan. Disusunnya struktur internal dalam Sinode Am GPR tentu diharapkan berjalannya hierarki pengambilan keputusan (manajerial) di dalam sinode tersebut yang tidak terpaku pada personal. Di dalam tubuh organisasi Sinode Am GPR juga terdapat birokrasi yang dapat dilacak dari unsur *rational-legal* dari terbentuknya susunan kepengurusan. Namun, barangkali saja unsur hierarki birokrasi yang mengikuti aturan dan ditentukan aturan, yang mestinya membuat urusan dan pekerjaan lebih efisien karena mengikuti aturan *legal-rational* itu, masih menjadi hambatan.

Sinode Am GPR dan Sengketa Internal

Sinode Am GPR difasilitasi Dirjen Bimas Kristen Kemenag di bawah kepemimpinan Jason Lase di tahun 2008 untuk mewadahi sinode-sinode yang ingin mendapatkan legalitas berupa Surat Keputusan (SK) sinode baru dari Kemenag RI. Sejak lebih kurang lima tahun belakangan ini, pihak Kemenag, khususnya Dirjen Bimas Kristen tidak lagi

mengakomodir munculnya sinode baru. Menurut pihak Dirjen Bimas Kristen, sejauh ini sudah terdapat 323 sinode gereja di seluruh Indonesia dan bahkan lebih. Atas berbagai pertimbangan, Dirjen Bimas Kristen tidak lagi dapat menerima pengajuan ijin untuk pembentukan sinode baru (*moratorium*). Jika terdapat usulan dari umat Kristen untuk mendapatkan pengesahan pendirian sinode, seringkali disarankan untuk bergabung dengan sinode lain yang sudah ada. Karena itu, beberapa sinode baru di Sulawesi Utara seperti Gereja Kristen Pimpinan Rohul Kudus (GKPR), Gereja Pimpinan Rohukudus Yahweh (GPRY), Gereja Filadelpia Pimpinan Rohkudus (GFPR), Gereja Pemulihan Firman (berpusat di Ambarawa), Gereja Gerakan Pimpinan Rohulkudus (GGPR), Kehilat Nasrani Pimpinan Rohulkudus, Kehilat Pemulihan Indonesia (berpusat di Magelang), Gereja Mesianik Indonesia Papua (berpusat di Jayapura), Kehilat Netzarin Tujuh Kaki Dian (berpusat di Timika) serta Kehilat Yehudim Torat Chayim (berpusat di Jakarta) diarahkan untuk bergabung dalam Sinode Am GPR yang dulunya bernama Sinode GPR. Atau, jika suatu sinode itu bergejolak internalnya sebuah saran juga untuk diselesaikan lewat pengadilan. Namun, saran pertamalah yang sering diindahkan pimpinan sinode (Wawancara Melius Lahagu, Ditjen Bimas Kristen, tanggal 7 Mei 2016).

Di luar sinode-sinode yang cukup besar di Manado, baik yang oikumenikal dan mainstream seperti GMIM, maupun yang evangelikal seperti GPDI (Pantekosta) dan seterusnya, muncullah sinode-sinode baru yang juga ingin mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Sinode-sinode baru ini lebih tepatnya termasuk juga ke dalam kelompok evangelikal. Atas saran Dirjen Bimas Kristen, sinode-sinode yang ingin berdiri sendiri itu bersedia bergabung dalam Sinode Am GPR. Namun, sejak awal pembentukan

hingga dalam perjalanannya, Sinode Am GPR ini tidak henti dirundung badai. Kekurangharmonisan di dalam tubuh sinode ini paling kuat terasakan manakala mencoba mencicipi ruang-ruang diskusi dan musyawarah di dalam sinode ini. Problem paling kelihatan di antaranya problem kepengurusan sinode, masalah perbedaan teologi, serta masalah kontroversi personal salah satu tokoh utama di dalam sinode ini.

Dalam kunjungannya ke Minahasa Bulan Agustus 2015 lalu, perwakilan Ditjen Bimas Kristen yang hadir ke Manado, Melius Lahagu mendapatkan laporan serta ungkapan bernada kekurangpuasan dari satu kelompok terhadap kelompok lain dalam sinode ini. Pada intinya mereka sama-sama ingin meminta ketegasan sikap pemerintah dalam menyelesaikan kekisruhan di dalam tubuh sinode ini.

Kepemimpinan Sinode

Dalam aspek kepemimpinan, tampak sekali di antara pengurus dan perwakilan sinode lain di dalamnya tidak dapat menerima keberadaan satu sama lain. Pengurus yang rata-rata pendeta ini belum secara bulat menyepakati model kepengurusan sinode, pembagian kekuasaan (*sharing of power*) serta representasi masing-masing perwakilan sinode-sinode dalam Sinode Am, sehingga belum saling menerima satu sama lain yang duduk dalam kepengurusan.

Beberapa saat setelah terbentuknya Sinode Am GPR, mereka para perwakilan dalam satu sinode baru ini sebenarnya cukup puas dan berjalan seperti layaknya sebuah sinode. Namun keharmonisan itu hanya seumur jagung, lantas muncullah ketidakpuasan di sana-sini. Akibatnya masing-masing sinode dalam Sinode Am GPR ingin eksis sendiri-sendiri, bahkan di antara pengurus hariannya sekalipun. Perlu disebutkan bahwa

sebelum mereka bergabung dalam sinode ini, sudah terdapat dua sinode, yaitu GKPR, pimpinan Petrus Dengah dan GPRY, pimpinan Yohan Mawati yang merintis pendirian Sinode Am ini. Dua orang ini merupakan gembala sidang sekaligus tokoh sentral di masing-masing sinodenya, yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama.

Yohan Mawati merupakan pendeta senior yang tampaknya menjadi figur sangat diperhitungkan dalam sinode gabungan ini. Awalnya ia merasa saran Dirjen Kemenag untuk menyatu dalam Sinode Am GPR itu terbaik untuk dijalankan karena pemerintah tidak lagi menerima pendaftaran sinode baru. Karena itu pihaknya, bersama Petrus Dengah, membuka diri untuk menerima sinode-sinode lain bergabung bersama sinodenya (GPRY) dan Dengah (GKPR) ke dalam Sinode Am GPR. Dirjen Bimas Kristen kemudian mengeluarkan SK yang menempatkan dua sinode induk ini sebagai tuan rumah bagi sinode-sinode lain yang bergabung dalam Sinode Am GPR ini. Namun belakangan, ia merasa kecewa dengan besarnya peran yang ingin diambil perwakilan-perwakilan sinode lain yang seharusnya tidak melebihi dari kewenangan yang dimilikinya sebagai perwakilan sinode induk yang menurutnya, telah bersedia menampung sinode-sinode lain. Sinodenya dianggapnya merupakan sinode induk yang memberi jalan dan fasilitas sinode lain di mata pemerintah untuk bisa bergabung dalam satu sinode, yaitu Sinode Am GPR.

Dalam perumpamaan Yohan Mawati, mereka yang tergabung dalam Sinode Am GPR itu dahulu adalah seperti orang-orang yang kelaparan dan kedinginan di luar rumah. Atas kebaikan hati pemilik rumah, orang-orang tersebut dipersilakan masuk dan tinggal di rumah tersebut. Namun setelah dipersilakan masuk dan menikmati segala fasilitas yang

ada, malah lama kelamaan mereka ingin memiliki rumah itu. Ada pula yang ingin membawa pergi tiang rumahnya. Karena itu ia merasa kecewa dengan perwakilan sinode lain, termasuk kecewa kepada keponakannya sendiri karena bernaung di sinode lain, yang menurutnya ia fasilitasi untuk dapat bereksistensi sesuai dengan saran pemerintah (Wawancara Yohan Mawati, tokoh sinode Am GPR, tanggal 9 Agustus 2015).

Sejak pembentukan awalnya, memang sebenarnya telah tercium bibit-bibit kekisruhan terlihat dari belum bulatnya konsep kepengurusan sinode baru ini. Menurut Petrus Dengah, dalam kepengurusan Sinode Am ini, ia mengusulkan agar tidak ada kepengurusan melainkan keterwakilan saja. Usulan dari dirinya selanjutnya waktu itu adalah, adanya klausul pula dalam perjanjian bahwa jika pemerintah ingin berhubungan dengan sinode tingkat bawah, maka akan ada perwakilan sinode yang ditunjuk ketua sinode. Di samping itu, kepemimpinan Sinode Am ini sebaiknya menurut Dengah merupakan pimpinan kolektif. Tidak perlu adanya pengurus harian, seperti ketua, sekretaris dan bendahara. Karena jika pengurus harian ini diwujudkan, dirinya khawatir kalau seseorang yang menduduki jabatan tersebut memanfaatkan jabatannya untuk menguntungkan sinodenya sendiri atau sinode lainnya dan malah akan merugikan sinode gabungannya. Selain itu, langkah tersebut dianggap pula dapat menyelesaikan masalah ketidakharmonisan dalam Sinode Am GPR. Setiap ketua sinode di bawah Sinode Am ini tetap memegang peranan.

Dalam perkembangannya, dikirimlah nama-naman dari masing-masing sinode. Perwakilan dari Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus (GKPR) dipilih Petrus Dengah sendiri, sementara dari Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh (GPRY) ditunjuklah Tommy. Periode

perwakilan itu hanya sampai Desember 2012. Maka, terjadilah kesepakatan dan lantas diaktekan notaris mengesahkan Sinode Am GPR seperti itu. Sinode GKPR pimpinan Dengah sendiri mempunyai sejumlah gereja, di antaranya di Airmadidi terdapat 5 gereja, di Manado terdapat 3 gereja, dan di Bitung 13 gereja.

Di luar usulan-usulan itu, ia tidak kalah heran munculnya keinginan kelompok yang dulunya menentang Sinode Am GPR, belakangan malah ingin bergabung Sinode Am dengan adanya klausul seperti itu. Artinya di sini terdapat kesan, seolah-olah penolakan atas anjuran pemerintah melalui Ditjen Bimas Kristen hanya muslihat saja. Diakui terdapat beberapa sinode lain yang sama-sama ingin diakui pemerintah yang awalnya menolak intervensi pemerintah dengan konsep penggabungan ini. Ternyata, mereka bukanlah suka atau tidak suka dengan Sinode Am GPR, melainkan masalah pribadi kepemimpinan. Beberapa sinode yang sebelumnya menentang, ternyata setelah Sinode Am GPR berdiri mereka ingin bergabung. (Wawancara dengan Petrus Dengah, pimpinan Gereja Kristen Pimpinan Roh Kudus, GKPR, tanggal 10 Agustus 2015).

Akan tetapi dalam perjalanannya, rupanya faktor kekuatan pengaruh dan kharisma masing-masing individu perwakilan pengurus sinode yang rata-rata juga gembala sidang atau pendeta ini turut menyebabkan skema penyelesaian ketegangan antarsinode kecil di dalamnya itu tidak berjalan mulus seperti diharapkan pihak Dirjen Bimas Kristen. Pihak perwakilan dari sinode lain tidak dapat menerima besarnya peran dan pengaruh individu lainnya, sebut saja peran sentral sosok Yohan Mawati. Mereka menginginkan agar pengurus Sinode Am dipilih secara demokratis. Tidak kalah gesit, mereka pun juga mendekati Dirjen Bimas Kristen agar keinginannya membentuk

kepengurusan sinode yang menurut mereka demokratis dapat terwujud. Dokri Gumolung, sekum Sinode Am dari Gereja Filadelpia Pimpinan Rohkudus, mantan orang dekat Yohan Mawati yang juga dosen Universitas Negeri Manado (Unema) menyesalkan pihak-pihak yang tidak lagi menghormati susunan kepengurusan hasil musyawarah antarsinode. Segala upaya untuk menjalankan kepengurusan Sinode Am GPR secara demokratis belum berhasil. Karena itu, pihaknya menginginkan agar masing-masing sinode dalam Sinode Am dikukuhkan saja oleh Dirjen Bimas Kristen dengan mengeluarkan SK untuk masing-masing sinode tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya dirinya yang kini mengembangkan sinodenya sendiri dan kini bangunan gerejanya di kawasan Malalayang hampir rampung berdiri dan telah menghabiskan dana sebesar 3 miliar, tidak terlalu mementingkan berdirinya Sinode Am itu sendiri (Wawancara dengan Dokri Gumolung, pimpinan Gereja Filadelpia Pimpinan Rohkudus, tanggal 8 Agustus 2015).

Seorang pendeta dari Sinode Gereja Gerakan Pimpinan Rohulkudus (GGPR), AN yang sinodenya juga tergabung dalam Sinode Am GPR, mempunyai kesan kurang simpatik pula terhadap figur Yohan Mawati. Pihaknya tidak meragukan pengaruh Yohan Mawati dalam Sinode Am GPR bentukan Dirjen Bimas Kristen ini. Namun ia tidak bisa menerima figur Yohan Mawati karena melihat sikap Yohan Mawati terhadap pimpinan sinodenya. Ia sendiri pernah ditegur secara keras oleh Yohan Mawati. (Wawancara dengan AN, pimpinan Gereja Gerakan Pimpinan Rohulkudus (GGPR), tanggal 9 Agustus 2015).

Tidak dipungkiri bahwa saat ini terjadi saling klaim di dalam tubuh Sinode Am GPR yang difasilitasi pemerintah ini, baik tentang komposisi serta sah atau tidaknya struktur kepengurusan

sinode yang baru. Sebagian menyepakati hasil musyawarah besar (Mubes) tanggal 7 April 2015 yang memutuskan kepengurusan sinode yang baru, sementara sebagian menolak dan tidak mengakui hasil Mubes tersebut. Mubes ini difasilitasi oleh Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI yang berlangsung di sebuah hotel di Jakarta. Pihak Yohan Mawati termasuk yang menolak, sedangkan pihak Dokri Gumolung lebih menerima.

Namun di luar keriuhan pihak yang menerima fasilitasi Dirjen Bimas Kristen untuk bergabung dalam satu sinode, ternyata masih ada gerakan ketidaksetujuan dari sinode lain atas saran Dirjen Bimas Kristen untuk membentuk Sinode Am GPR ini. Salah satu kelompok ini terdeteksi misalnya dari kelompoknya Ersi Mayori yang mempunyai sinode sendiri. Bahkan kelompok yang tidak setuju ini pernah berencana menyomasi dirjen Bimas Kristen. Mereka ingin Dirjen mencabut SK karena mereka tidak bersedia berada di Sinode Am. Dalam persidangan awal somasi mereka kalah, dianggap tidak layak untuk dilanjutkan perkaranya. Namun begitu, mereka juga tetap tidak mau bergabung. Tanpa menafikan pihak-pihak yang berselisih dalam sinode ini, Yohan Mawati dan Petus Dengah, dua pimpinan perwakilan dari sinode penggagas Sinode Am, terus berusaha menjaga eksistensi organisasi Sinode Am, walau badai terus menghantam sinode gabungan ini.

Perbedaan Teologis

Faktor pemicu lain terjadinya kekisruhan dalam Sinode Am GPR ini juga karena terjadi masalah dalam penafsiran teologi. Tidak dapat ditutupi adanya perbedaan penafsiran teologi antarsinode yang tergabung dalam Sinode Am GPR ini. Seperti disampaikan sebelumnya, Sinode Am ini GPR ini merupakan kumpulan beberapa sinode

dengan karakteristik yang berbeda-beda, termasuk perbedaan teologi Kekristenan yang mereka anut. Perbedaan paling menyolok itu sekitar pada penggunaan istilah Yesus yang diubah menjadi Yahweh oleh sebagian sinode anggota. Dikenal pula oleh sebagian sinode adanya ibadah hari Sabat (sabtu) dan praktik sunat bagi laki-laki. Pihak sinode anggota lain tidak setuju dengan perubahan itu dan masih tetap menginginkan penyebutan Yesus, ibadah hari minggu dan tidak mengharuskan sunat.

Menurut Petrus Dengah, masuknya doktrin baru di sinode ini turut menyumbang terhadap polemik dalam sinode ini. Ia sendiri tidak setuju dengan doktrin Yahweh, paham itu tidak sesuai dengan doktrin pihaknya. Terdapat kelompok yang mengartikan secara alkitabiah dari Kristen yang mereka berbeda dengan pihaknya.

“Dulu juga pernah ditawarkan kepada kami terdapat 4 doktrin, pertama mengganti nama Allah dengan Yahweh. Kedua, mereka beribadah harus berkiblat ke Yerusalem, kami tidak mau. Ketiga, mereka harus menggunakan kerudung, seperti muslim. Padahal dalam al Kitab dianjurkan memakai baju apapun tidak masalah, kami menolak ini. Dan keempat, harus tidak bernatal, tidak merayakan natal. Mereka merayakan tabernakel, seperti Yahudi. Kami tidak mau seperti Yahudi. Karena Yahudi yang menyalibkan Yesus, kami tidak mau ala Yahudi. Kami mau substansi al Kitabnya. Terakhir, sunat. Menurut kami itu perjanjian lama, jadi tidak diikuti. Setelah ketidaksetujuan doktrin itu, berpisahlah GKPR. Setelah terjadi perpecahan itu, terjadilah perebutan kepemimpinan yang kemudian ditengahi oleh Dirjen tadi.” (Petrus Dengah, Ibid)

Menurutnya, paham itu termasuk paham Yudaisme. Karena itu, terjadilah dualisme paham sehingga tidak dapat bersatu dalam satu sinode gabungan.

Berangkat dari situlah dirinya dan beberapa kawannya langsung mencari solusi dengan mendatangi Kanwil Kemenag Sulut waktu itu. Mereka meneruskan ke Dirjen Bimas Kristen di Jakarta. Sampai berjalan lebih kurang delapan tahun pergumulan, tidak juga dapat terpecahkan karena Kementerian Agama tidak lagi memberikan ijin terhadap sinode baru. Walau terdapat perbedaan penafsiran teologis, mereka didorong harus tetap berada dalam Sinode Am atau diselesaikan melalui jalur pengadilan. Namun begitu, dimulailah konsultasi dengan pihak yang memiliki doktrin berbeda, lebih spesifik dengan pihak Yohan Mawati.

Diperoleh informasi, pihak Yohan Mawati mulai mengenalkan doktrin Yahweh sejak pertengahan tahun 1990-an. Kelompok Yohan Mawati malah seperti mendapat amunisi pengalaman di Malaysia dengan pelarangan sebutan Allah bagi umat Kristen belum lama ini. Menurut mereka, Allah adalah Tuhan milik umat Islam dan untuk umat Kristen, versi mereka, seharusnya menyebutnya berbeda. Isu seperti ini sempat muncul dalam sesi tanya jawab yang berlangsung di dalam gereja milik sinode GPRY pimpinan Yohan Mawati di Malalayang, Manado pada tanggal 8 Agustus 2015, yang dihadiri peneliti dan pejabat dari Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI.

Perbedaan doktrin ini juga diakui oleh beberapa perwakilan sinode lain yang tergabung dalam sinode gabungan ini. Mereka mengaku awalnya setuju dan mengikuti Yohan Mawati. Namun, setelah Yohan Mawati mengenalkan doktrin Yahweh, satu per satu dari mereka mulai menjauh. Hal ini seperti diakui pimpinan Gereja Gerakan Pimpinan Rohulkudus (GGPR) serta pimpinan Gereja Filadelfia Pimpinan Rohulkudus. Pihak GGPR menengarai perubahan doktrin itu terjadi sejak kepulangan Yohan Mawati melawat ke Israel sekitar tahun 1990an (AN, Ibid).

Akan tetapi, Yohan Mawati tetap kukuh dengan pendirian doktrinnya, sehingga dalam doa-doa pun sebutan Yahweh digunakan. Hal ini turut membuat perwakilan sinode lain merasa tidak nyaman berada dalam Sinode Am GPR dengan pengaruh Yohan Mawati dan doktrinnya yang terlalu kuat.

Terhimpun informasi bahwa di dalam tubuh sinode GPRY pimpinan Yohan Mawati sendiri terjadi friksi mengenai sesebutan Yahweh ini. Hal ini diketahui juga oleh sinode lain yang tidak sependapat dengan penafsiran tersebut. Petrus Dengah mengetahui hal itu setelah ia merasa kesulitan untuk memperoleh nama yang diusulkan dari pihak Yohan Mawati untuk duduk sebagai perwakilan di Sinode Am GPR. Akibat friksi itu, menurut Dengah, di dalam tubuh sinode GPRY pimpinan Yohan Mawati sendiri telah terpecah menjadi 12 sinode kecil-kecil. Salah satu yang masih bersedia menerima pada sebutan Yahweh, yaitu kelompok Dokri Gumolung dari Gereja Filadelpia Pimpinan Rohkudus. Kelompok Dokri, bekas sekum Sinode Am GPR dan pernah menjadi orang dekat Yohan Mawati, hanya bersedia menerima Yahweh, namun menolak berkiblat ke Yerusalem, Hari Raya Tabernakel, dan juga sunat (Petrus Dengah, Ibid).

Atas perbedaan doktrin ini, pihak yang bertentangan dalam tubuh Sinode Am GPR ini mendesak Ditjen Bimas Kristen untuk segera mengeluarkan keputusan, yaitu *pertama*, mengembalikan SK pimpinan Sinode Am seperti awal pembentukannya yang hanya diwakili oleh dua jemaat GPR Yahweh dan GKPR dan *kedua*, setelah pecah menjadi lebih kurang 10 majelis (gereja/sinode) sendiri-sendiri, sebaiknya masing-masing diberi SK oleh Ditjen Bimas Kristen untuk mengakhiri polemik ini karena memang sudah susah disatukan lagi (Yohan Mawati, Ibid & Dokri Gumolung, Ibid).

Petrus Dengah sepaham dengan Yohan Mawati dalam hal ini. Bahwa seharusnya SK Kemenag dikembalikan lagi pada sinode asal, dua sinode yaitu GKPR dan GPRY. Dua sinode ini yang mengundang sinode-sinode kecil lain, kemudian dikumpulkan untuk mendirikan Sinode Am. Terkait dengan hasil Mubes 7 April 2015 di Jakarta, tentang perombakan pengurus, ia masih merasa bersyukur karena Dirjen Bimas Kristen belum mengeluarkan SK untuk kepengurusan Sinode Am baru (Petrus Dengah, Ibid).

Peran dan Fungsi Pendeta

Secara umum, peran pendeta dalam Sinode Am sangat sentral, seperti pada umumnya gereja kharismatik atau evangelikal. Gembala sidang diberi kepercayaan penuh untuk membina jemaat, termasuk mengelola keuangan dan aset. Dalam hal hierarki keputusan dan kewenangan juga jenjangnya terlalu pendek. Tidak ditemukan struktur berjenjang yang berlapis-lapis, kecuali mungkin pimpinan tertinggi sebagai Gembala Sidang dan pendeta di bawahnya yang langsung bergerak.

Hal tersebut berkorelasi dengan implementasi doktrin yang menyangkut finansial. Doktrin perpuluhan sangat ketat dijalankan dalam gereja-gereja yang tergabung dalam Sinode Am. Doktrin perpuluhan ini sebenarnya lebih dahulu dijalankan oleh sinode lain seperti Pantekosta. Menurut salah satu sumber dari lingkungan Kemenag Sulawesi Utara, para pendeta yang tergabung dalam Sinode Am GPR ini dulunya adalah orang-orang jemaat Gereja Pantekosta, sehingga tidak salah jika menerapkan doktrin yang sama (Wawancara dengan John Tilaar, Kepala Kantor Kementerian Agama Minahasa Utara yang juga pendeta GMIM, tanggal 12 Agustus 2015).

Kombinasi antara kuatnya figur pendeta, kemandirian pendeta dalam mengelola asset gereja serta besarnya dana dari jemaat, menjadikan sebuah kewajaran jika bangunan-bangunan fisik gereja yang didirikan gereja ataupun sinode kharismatik ini jauh lebih megah daripada gereja-gereja Lutheran atau gereja adat. Dalam hal ini sebut misalnya gereja-gereja yang dinaungi sinode GMIM di seantero Minahasa misalnya. Bentuk bangunan gerejanya pun tidak lagi mewakili bentuk adat sebagaimana direpresentasikan oleh bangunan-bangunan gereja GMIM dengan ciri khasnya atap yang lancip dan menjulang ke atas, di tambah salib di bagian puncaknya.

Perbedaan lain dengan gereja Lutheran-oikumenikal, gereja-gereja kharismatik seperti yang ditempuh Sinode Am GPR ini dalam hal pengawasan terhadap pendeta. Begitu besarnya peran yang dimiliki pendeta, tidak diimbangi dengan adanya pengawasan yang dapat mengontrol ruang gerak pendeta. Kepercayaan jemaat terhadap pendetanya begitu total. Berbeda dengan gereja Lutheran seperti GMIM misalnya, kontrol terhadap pendeta sangat ketat, baik dari kalangan pendeta lain maupun dari jemaat. Pendeta juga tidak diperkenankan memegang uang gereja. Pengelolaan keuangan gereja dan dana jemaat hanya dilakukan oleh jemaat sendiri (John Tilaar, *Ibid*).

Menurut Jeffri Mangero, salah seorang pendeta GMIM, pendeta dalam sinode GMIM juga diawasi dalam pengertian dijadikan bahan persidangan jika misalnya memberikan khutbah atau menafsirkan ayat berbeda dengan penafsiran mainstream. Apalagi jika terkait dengan penggunaan dana. Karena itu, konflik maupun polemik di antara pendeta di dalam tubuh GMIM segera dapat cepat ditangani dengan mekanisme berjenjang. Tidak terdapat

tokoh pendeta yang benar-benar sentral, seperti dalam gereja kharismatik, yang boleh menafsirkan ayat dan firman menurut penafsirannya sendiri. Dalam memilih kepengurusan sinode pun juga dilakukan melalui pemilihan terbuka, sehingga siapa yang terpilih merupakan figur yang paling banyak didukung mayoritas anggota (Wawancara dengan Jeffri Mangero, salah satu pendeta GMIM, tanggal 11 Agustus 2015).

Begitu pula dalam hal pendidikan menjadi pendeta. Sinode GMIM sangat ketat menyeleksi seseorang untuk menjadi pendeta dengan melalui jenjang pendidikan yang cukup lama. Mereka rata-rata harus menempuh pendidikan teologi hingga jenjang sarjana. Berbeda pendeta-pendeta Sinode Am GPR yang dijumpai selama penelitian, mereka ada yang mengaku baru setelah pensiun terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ada pula karena ingin berubah alias bertobat secara total dari dunia kelam kemudian dengan menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Ada pula karena terkesima atau mengalami ketakjuban karena proses pengurapan medis dan seterusnya. Karena itu tidak heran jika dalam gereja kharismatik juga dikenal dengan bahasa roh, bahasa yang tidak bisa dicerna oleh orang awam Kristen sekalipun.

Penutup

Sinode Am GPR dibentuk atas fasilitasi Dirjen Bimas Kristen Kemenag untuk mewadahi sinode-sinode yang ingin mendapatkan legalitas berupa Surat Keputusan (SK) sinode baru dari Kemenag RI. Dirjen Bimas Kristen tidak lagi mengakomodir munculnya sinode baru dan jika terdapat usulan dari umat Kristen untuk mendapatkan pengesahan pendirian sinode, seringkali disarankan untuk bergabung dengan sinode lain yang sudah ada.

Namun, setelah Sinode Am GPR berdiri, kekurangharmonisan di dalam tubuh sinode ini pun muncul. Bahkan problem ini telah dilaporkan kepada Dirjen Bimas Kristen dan terus menjadi pantauan. Ketegangan antarpengurus ini juga masih terasa kuat terasakan manakala mencoba mencicipi ruang-ruang diskusi dan musyawarah di dalam sinode ini. Problem paling kelihatan di antaranya problem kepengurusan sinode, masalah perbedaan teologi, serta masalah kontroversi personal salah satu tokoh utama di dalam sinode ini. Pengurus yang hampir semuanya pendeta ini belum secara bulat menyepakati model kepengurusan sinode, pembagian kekuasaan (*sharing of power*) masing-masing perwakilan sinode-sinode dalam sinode ini, hingga saling menerima satu sama lain yang duduk dalam kepengurusan.

Ditinjau dari sudut pandang sosiologi organisasi, permasalahan yang menyangkut sinode ini juga terkait dengan hierarki kepengurusan dan kewenangan serta tanggung jawab setiap level kepengurusan yang masih belum berjalan maksimal. Pengambilan keputusan tidak terlalu berjenjang karena peran tokoh sentral sangat dominan. Di

dalam tubuh organisasi Sinode Am GPR sebenarnya juga terdapat birokrasi yang dapat dilihat dari terdapatnya unsur rational-legal dengan terbentuknya susunan kepengurusan. Namun, unsur hierarki birokrasi yang mengikuti aturan dan ditentukan aturan, yang mestinya membuat urusan dan pekerjaan lebih efisien, masih menjadi dambaan.

Sebagi kelompok yang dicirikan KKP yang bercorak evangelikal (kharismatik), dalam sinode ini, gembala sidang diberi kepercayaan penuh untuk membina jemaat, termasuk mengelola keuangan dan aset. Dalam hal hierarki keputusan dan kewenangan juga jenjangnya terlalu pendek. Tidak ditemukan struktur berjenjang yang berlapis-lapis, kecuali mungkin pimpinan tertinggi sebagai Gembala Sidang dan pendeta di bawahnya yang langsung bergerak. Berdasarkan uraian ini, maka sebenarnya unsur kharisma seorang tokoh dan kecenderungan patrimonial yang beroperasi dalam sinode itu sulit terbantahkan, setidaknya hingga saat ini. Karena itu, walaupun sistem pengelolaan organisasinya mengikuti irama kekinian, namun budaya organisasi yang berkembang masih lebih lekat pada gaya organisasi tradisional.

Daftar Pustaka

- Aritonang, Jan Sihar & Steenbrink, Kare. *A History of Christianity in Indonesia*. Leiden & Boston: Brill. 2008.
- Borkenhagen, Lea Monique. *Minahasa's Clove Agriculture: The Church and the Production of Power through the Indonesian State*. A Dissertation University of California, Berkeley. ProQuest Information and Learning Company. 2004.
- Donaldson, Lex. *Organizational Sociology*. www.eolss.net/sample-chapters/.../e6-99a-20.pdf, diakses tanggal 3 Februari 2016.
- Nuhrison. *Gereja Masehi Injili Di Minahasa Provinsi Sulawesi Utara*, dalam Hakim, Bashori A. *Direktori Aliran, Faham Dan Gerakan Keagamaan Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Departemen Agama RI, 2009.

- PGI. *Gerakan Oikumene Tegar Mekar di Bumi Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1993.
- Ramstedt, Martin & Thufail, Fadjar Ibnu. *Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan Pada Masa Pasca Orde Baru*. Jakarta: Grasindo, Pusat Penelitian Sumberdaya Regional LIPI & Max Planck Institute for Social Anthropolology. 2011.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi. Edisi Revisi*. Depok: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2004.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. *Memahami Metode Kualitatif*. Jurnal Makara, Vol. 9, No. 2, Desember 2005.
- Van Kooij, Rijnardus A. & Tsalatsa, Yam'ah A. *Bermain dengan Api: Relasi Antara Gereja-gereja mainstream dan Kalangan Kharismatik dan Pantekosta*. Jakarta: Gunung Mulia, 2007.
- Watania, Andre Kristian. *Sejarah Perkembangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) Pusat Silian (1956-2014)*. Jurnal Skripsi. Universitas Sam Ratulangi. 2015.